



LAPORAN HASIL PENELITIAN

D-LPPM Nomor 035

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KREATIF GUNA MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(Studi Kasus : Kota Solo Provinsi Jawa Tengah)**

Peneliti:

Dr. BAMBANG WAHYUDI, MM., M.Si.

Dr. SUPANDI., S.Sos., MM.

SAKUM., SE., MM

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

BOGOR

OKTOBER 2017

HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERTAHANAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul : Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Industri Kreatif Guna Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus : Kota Solo Provinsi Jawa Tengah)
2. Bidang Keilmuan : Ekonomi Pertahanan
3. Peneliti : 1. Dr. Bambang Wahyudi, MM.,M.Si
2. Dr. Supandi., S.Sos., MM
3. Sakum., SE., MM.
4. Jumlah Peneliti : 3 orang
5. Lokasi Kegiatan : Kota Solo

Mengetahui:
Ketua LPPM Unhan



Tjuk Agus Minahasa, S.IP
Mayor Jenderal TNI

Bogor, Oktober 2017
Kapuslit
Manajemen Pertahanan,



Dr. Tirton Nefianto, S.Sos., M.A.P
Kolonel Inf NRP. 32369

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkah, hidayah serta ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Industri Kreatif Guna Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” (Studi Kasus : Kota Solo Provinsi Jawa Tengah).

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Solo, Peneliti berharap penelitian ini, bermanfaat bagi Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi di kota Solo, dan berguna bagi dunia Akademik sebagai bahan kajian lebih lanjut. Penelitian ini dilaksanakan sejalan dengan salah satu dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mengimplementasikan fungsi penelitian ilmiah. Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam mengembangkan industri kreatif di Kota Solo.

Dengan kerendahan hati, kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, disana – sini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak.

Dengan telah terlaksananya tahapan – tahapan kegiatan penelitian ini, dengan baik, aman dan lancar, serta selesai tepat waktu, maka pada kesempatan ini pula, kami Tim Peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Pertahanan
2. Ketua LPPM Unhan
3. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan
4. Walikota Solo Provinsi Jawa Tengah
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solo
6. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Solo
7. Kepala Bappeda Pemerintah Kota Solo
8. Kepala Kadin Pemerintah Kota Solo
9. Sesprodi Ekonomi Pertahanan
10. Para Pejabat yang Pemerintah Daerah

11. Para Pengrajin Blangkon, Batik dan Gitar serta,
12. Semua Pihak yang telah Membantu Penelitian ini

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rachmat, taufik dan hidayah- Nya kepada kita semua

Bogor, Oktober 2017

Peneliti,

1. Dr. Bambang Wahyudi, MM.,M.Si
2. Dr. Supandi., S.Sos., MM
3. Sakum., SE., MM

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan salah satu bentuk realisasi integrasi ekonomi yang merupakan agenda utama negara ASEAN 2020. MEA berinisiatif agar negara-negara anggota ASEAN dapat mempromosikan pergerakan bebas barang, jasa-jasa, investasi, dan pekerja-pekerja terdidik lintas kawasan ASEAN. Upaya yang dilakukan melalui *Preferential Trading Arrangement* (PTA) pada tahun 1977 dan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992. Dari Ketiga agenda tersebut PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif. Dengan adanya MEA 2015 akan dapat mendorong terciptanya pembangunan jaringan-jaringan kerja produksi dan juga akan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor ekonomi dan terciptanya pergerakan bebas pelaku-pelaku usaha serta tenaga kerja yang terdidik dan berwawasan. Juga sistem perdagangan dan syarat-syarat pabean dapat terstandarisasi dan sederhana, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya transaksi antara sesama negara anggota ASEAN. Pemberlakuan MEA atau pasar tunggal di kawasan ASEAN akan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap industri di tanah air khususnya dalam pengembangan industri kreatif. Kota Surakarta sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif mewakili Propinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan budaya dan insan kreatif yang sangat besar. Setiap kecamatan memiliki sumberdaya kreatif dan produk kreatif yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Potensi tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif yang berdampak pada tingginya sumbangan sektor - sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan 15 jenis usaha kreatif. Dari 15 jenis usaha kreatif tersebut, Kota Surakarta telah menetapkan 5 jenis industri yang menjadi unggulan kota Surakarta, yaitu seni pertunjukkan, desain, kerajinan, kuliner dan fesyen. Penetapan 5 jenis unggulan ini tidak terlepas dari Kota Surakarta sebagai kota yang memiliki banyak warisan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan industri kreatif di Kota Solo tahun 2016 dan kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan industri kreatif tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, artikel berita di koran, artikel ilmiah yang terpublikasi, serta website instansi-instansi terkait, dan data data Primer yang didapat, melalui *interview, in-depth*, dan *focus group discussion*.(FGD).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan kebijakan Pengembangan Industri kreatif menggunakan pendekatan pola kwadran dan Pohon anggaran IKKu dan IKK. Sinergi antar stakeholders kota, yang disebut *quadro helix plus*, (akademisi, pengusaha/praktisi/professional, pemerintah kota, komunitas, dan media) dikembangkan sebagai suatu strategi untuk mengembangkan Industri Batik, Industri Blangkon, dan Industri Gitar Solo, sebagai produk unggulan Industri Kreatif dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkannya pertumbuhan PDRB kota Surakarta dari tahun ke tahun, Selain itu dapat menekan Laju Inflasi dan terbukanya sentra produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Oleh karena itu sangat diperlukan peraturan pemerintah Kota sebagai regulator, fasilitator, katalisator dan evaluator, dalam meminimalisasi hambatan dibidang kemampuan tenaga kerja, teknologi produksi dan pemasaram yang dihadapi saat ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemda, Pengembangan, Industri Kreatif MEA.

ABSTRACT

The ASEAN Economic Community (AEC) is one of the realizations of economic integration which is the main agenda of ASEAN countries 2020. The MEA has initiated that ASEAN member countries can promote the free movement of goods, services, investments and workers, well-educated workers across the ASEAN region, efforts made through the Preferential Trading Arrangement (PTA) in 1977 and the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992. Of the three agendas the PTA and AFTA emphasized the reduction and elimination of tariff barriers, while the MEA emphasize the reduction and elimination of non-tariff barriers. With the 2015 MEA will be able to encourage the creation of production networking networks and will also strengthen regional integration in the economic sectors and the creation of free movement of business actors and educated and insightful workers. Also the trading system and customs conditions can be standardized initiation and simple, so it is expected to reduce transaction costs among ASEAN member countries. The enactment of an AEC or a single market in the ASEAN region will have an impact both directly and indirectly to the industry in the country, especially in the development of creative industries. The city of Surakarta as one of the centres of creative economy representing Central Java Province has a wealth of culture and creative people are very large. Each district has creative resources and creative products that are highly likely to be developed. This potential encourages the growth of creative economy which impacts on the contribution of creative economy sectors to the economic growth of Surakarta City. Currently the Indonesian government has identified 15 creative business types. Of the 15 types of creative business, Surakarta City has set 5 types of industries that became the main city of Surakarta, namely art performances, design, crafts, culinary and fashion. Determination of 5 types of this flagship cannot be separated from the city of Surakarta as a city that has many cultural heritage. This study aims to analyze the development of creative industries in the city of Solo in 2016 and the policy of Solo City Government in developing the creative industry in 2016. This research uses qualitative methods with descriptive analysis approach, Data in research obtained from secondary data sourced from books, magazines, articles news published in newspapers, published scientific articles, and the websites of related agencies, and Primary data obtained through interviews, in-depth, and focus group discussions (FGD).

The results of this study indicate that the Government of the City of Surakarta in implementing the policy of Creative Industry Development using the approach of the quadrant pattern and the IKKU and IKK budget trees. The synergy between stakeholders of the city, called quadro helix plus, (academicians, businessmen / practitioners / professionals, municipalities, communities, and media) was developed as a strategy to develop Batik Industry, Blangkon Industry, and Solo Guitar Industry as the superior product of Creative Industry can absorb the workforce and increase the GDP growth of the city of Surakarta from year to year, In addition it can suppress the rate of inflation and the opening of production centres so as to improve the welfare of the people of Surakarta. It is therefore imperative that city government regulations as regulators, facilitators and evaluators be used to minimize barriers in the field of workforce quality, production technology and marketing faced today.

Keywords: Policy, Local Government, Development, Creative Industries MEA.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| 1.4.1. Manfaat Praktis | 13 |
| 1.4.2. Manfaat Teoritis | 13 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 14 |
| 2.1. Definisi Konseptual..... | 14 |
| 2.2. Teori Kebijakan | 15 |
| 2.3. Pergeseran Pola Kegiatan Ekonomi..... | 23 |
| 2.4. Ergonomi Makro..... | 24 |
| 2.5. Model Sistem Socioteknik | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| 3.1. Pendekatan Analisis..... | 33 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 34 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| 3.4. Teknis Pengolahan Data dan Analisis Data | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 38 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kota Surakarta/ Solo | 38 |
| 4.1.1.1. Letak dan Kondisi Geografis | 42 |
| 4.1.1.2. Kondisi Demografi | 44 |
| 4.1.1.3. Ketenagakerjaan | 46 |
| 4.1.1.4. Kondisi Sosial..... | 46 |
| 4.1.1.5. PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) | 51 |
| 4.1.1.6. Potensi Ekonomi Kreatif Surakarta..... | 53 |
| 4.1.1.7. Potensi Arsitektur Heritage..... | 53 |
| 4.1.2. Kesejahteraan Masyarakat | 56 |
| 4.2. Perkembangan Industri Kreatif di Kota Solo Tahun 2016..... | 61 |
| 4.2.1. Perkembangan Industri Kreatif Berdasarkan Bidang Kegiatan | 61 |
| 4.2.2. Perbandingan Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia Berdasarkan Bidang Kegiatan..... | 66 |
| 4.2.3. Pertumbuhan Industri Kreatif di Berbagai Bidang Kegiatan | 69 |
| 4.2.4. Kontribusi Industri Kreatif..... | 69 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Kreatif | 70 |
| 4.2.6. Produk Unggulan Industri Kreatif di Surakarta, dalam Menghadapi Persaingan dalam Pasar MEA | 71 |
| 4.2.7. Potensi Pengembangan Industri Kreatif di Kota Surakarta | 73 |
| 4.2.8. Model Pengembangan Industri Kreatif..... | 75 |
| 4.3. Kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam Mengembangkan Industri Kreatif Tahun 2016..... | 78 |
| 4.3.1. Kerangka Konsep | 78 |
| 4.3.2. Pondasi dan Pilar Pengembangan Ekonomi Kreatif | 86 |
| 4.3.3. Aktor Utama Penggerak Ekonomi Kreatif | 88 |
| 4.3.4. Peran Masing – Masing Aktor Utama Penggerak Ekonomi Kreatif | 89 |
| 4.4. Analisis Pembahasan..... | 91 |
| 4.4.1. Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif Melalui Pendekatan Pola Kwadran dan Pohon Anggaran IKKU dan IKK | 91 |
| 4.4.2. Analisis Penelitian Terhadap Industri Kreatif, Batik, Blangkon Gitar ... | 95 |
| 4.4.2.1. Analisis Industri Kreatif Batik Solo..... | 95 |
| 4.4.2.2. Analisis Industri Kreatif Kerajinan Blangkon Surakarta | 102 |
| 4.4.2.3. Analisis Industri Kreatif Kerajinan Gitar Solo | 108 |
| BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... | 118 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 118 |
| 5.2 Rekomendasi..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan salah satu bentuk realisasi integrasi ekonomi dimana ini merupakan agenda utama negara ASEAN 2020. Adapun visi dari ASEAN tersebut adalah aliran bebas barang (*free flow of goods*) dimana tahun 2015 perdagangan barang dapat dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Selain itu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang berintegrasikan dalam membangun ekonomi yang merata dan dapat pula mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam Deklarasi ASEAN Concord II tahun 2016, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah komunitas atau masyarakat ASEAN pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 pilar, yakni, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Kemudian pada tahun 2007, mereka memutuskan untuk mempercepat terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN *Economic Community* (AEC) pada tahun 2015. Dimana para pemimpin ASEAN setuju bahwa proses integrasi ekonomi regional di percepat dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2007 agar di bentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

Sebenarnya pernyataan di atas juga sudah pernah dijelaskan pada tahun 1998 di Ha Noi, Vietnam yang mengemukakan bahwa ASEAN bertujuan untuk menciptakan kawasan yang sejahtera dan sangat kompetitif dimana terdapat arus barang, jasa, dan modal yang berintegrasi di ASEAN. Tujuan utama MEA 2015 adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang setara dengan negara anggota-anggota ASEAN dan untuk membuat ASEAN menjadi sebuah kawasan ekonomi yang sangat kompetitif yang akan sepenuhnya dapat terintegrasi dalam ekonomi global (Tulus T.H.Tambunan: 2013).

MEA berinisiatif agar negara-negara anggota ASEAN dapat mempromosikan pergerakan bebas barang, jasa-jasa, investasi, dan pekerja-pekerja terdidik lintas kawasan ASEAN. Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ASEAN sebagai kawasan aliran bebas barang dalam MEA merupakan kelanjutan dan

penyempurnaan dari agenda yang sebelumnya pernah dilaksanakan yaitu *Preferential Trading Arrangement* (PTA) pada tahun 1977 dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992. Perbandingan dari ketiga agenda tersebut adalah bahwa PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif (Sjamsul Arifin dkk, 2008:71). Dengan adanya MEA 2015 akan dapat mendorong terciptanya pembangunan jaringan-jaringan kerja produksi dan juga akan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor ekonomi dan terciptanya pergerakan bebas pelaku-pelaku usaha serta tenaga kerja yang terdidik dan berwawasan. Selain itu sistem perdagangan dan syarat-syarat pabean dapat terstandardisasi dan sederhana, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya transaksi antara sesama negara anggota ASEAN. Penerapan MEA 2015 akan mentransformasikan ASEAN ke sebuah pasar tunggal yang berbentuk basis produksi, seperti Masyarakat Eropa (ME). Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN tersebut memiliki lima pilar liberalisasi sebagai kerangka kerja MEA 2015 yang meliputi: liberalisasi arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan pasar tenaga kerja. Dalam arus barang tersebut sudah jelas akan mempengaruhi arus ekspor dan impor barang dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali, tahun 2003 para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa MEA akan menjadi tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2020 yang dituangkan pada deklarasi *Bali Concord II*. Selain MEA ada pula *ASEAN Security Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* yang merupakan 2 pilar penting lainnya yang harus diwujudkan guna mencapai cita-cita terciptanya *ASEAN Community* atau Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 yang diselenggarakan pada Januari 2007 di Cebu, Filipina para pemimpin ASEAN semakin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk segera mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Pada KTT tersebut para pemimpin ASEAN juga menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan MEA pada tahun 2015 untuk mengubah ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dimana para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan

Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN *Economic Community* (AEC)". Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal)
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM)
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI)
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

MEA sendiri merupakan salah satu tahapan untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yaitu terwujudnya Komunitas ASEAN 2020. Disisi lain MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Pasar tunggal dan basis produksi,
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi,
3. Kawasan pengembangan ekonomi yang merata, dan
4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Sedangkan komponen MEA adalah :

1. Aliran bebas barang (*free flow of goods*)
2. Aliran bebas jasa (*free flow of service*)
3. Aliran bebas investasi (*free flow of investment*)
4. Aliran bebas modal (*free flow of capital*).

Fenomena tersebut berdampak pada terbukanya pasar bebas yang membawa persaingan berat bagi eksistensi pelaku ekonomi. Indonesia telah menghadapi tantangan pasar bebas pada akhir tahun 2015 yaitu ASEAN *Economic Community* (AEC) atau seringkali disebut dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). MEA dibentuk dan disepakati oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Kerjasama

regional ini bertujuan meningkatkan daya saing kawasan secara menyeluruh di pasar dunia, menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, maka seluruh anggota negara ASEAN sepakat untuk mewujudkan integritas ekonomi. Serbuan barang, jasa hingga SDM akan terjadi dan tentu akan memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia baik dalam pertahanan negara maupun kesejahteraan. Dalam menghadapi persaingan tersebut, maka Indonesia perlu segera bersiap diri dengan cara meningkatkan daya saing nasional dalam meningkatkan ketahanan nasional.

Pemberlakuan MEA atau pasar tunggal di kawasan ASEAN akan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap industri di tanah air khususnya dalam pengembangan industry kreatif.

Persiapan pemerintah Indonesia salah satunya melakukan pendampingan dan memfasilitasi pelaku industri kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah kabupaten dan kota, termasuk Solo. Industri Kreatif merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain Industri Budaya atau juga Ekonomi Kreatif (David 2002). Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Menurut Howkins, Ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, Penelitian dan Pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian, berbagai pihak berpendapat bahwa "kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama" dan bahwa "industri abad kedua puluh satu akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi.

Di Indonesia sendiri industri berbasis kreativitas telah dilakukan pemetaan industri kreatif oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menggolongkan usaha-usaha yang termasuk dalam bagian dari industri kreatif:

1. Periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 5 digit; 73100
2. Arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*Town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior). Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 5 digit; 73100
3. Pasar Barang Seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.
4. Kerajinan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).

5. Desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.
6. Fesyen: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.
7. Video, Film dan Fotografi: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya manajemen produksi film, penulisan skrip, tata sinematografi, tata artistik, tata suara, penyuntingan gambar, sinetron, dan eksibisi film.
8. Permainan Interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
9. Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.
10. Seni Pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
11. Penerbitan dan Percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak: kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.
13. Televisi dan Radio: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
14. Riset dan Pengembangan: kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.
15. Kuliner: kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar internasional. Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia. Hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik, membuat keunggulan komparatif tersebut tidak tergalikan menjadi lebih bernilai ekonomis. Kegiatan ekonomi kreatif sebagai prakarsa dengan pola pemikir cost kecil tetapi memiliki pangsa pasar yang luas

serta diminati masyarakat luas diantaranya usaha kuliner, assesoris, cetak sablon, bordir dan usaha rakyat kecil seperti penjual bala-bala, bakso, comro, gehu, batagor, bajigur dan ketoprak.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, Industri Kreatif menyumbang Rp 642 Triliun dari Total Penerimaan Domestik Bruto Republik Indonesia, Kontribusi terbesar berasal dari usaha kuliner sebanyak 32,4 persen, mode 27,9 persen, dan kerajinan 14,88 persen. Dari sub sektor yang ada, sedikitnya ada tiga bidang yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yakni teknologi informasi sebesar 8,81 persen, periklanan 8,05 persen, dan arsitektur 7,53 persen.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengembangkan industri kreatif adalah Kota Solo. Kota Surakarta, juga disebut **Solo** atau **Sala**, adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 13.636/km². Kota dengan luas 44 km², ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755. Akibat perpecahan kerajaan, di Solo sebagai kota dengan dua administrasi Kota Solo memiliki semboyan “BERSERI” akronim dari “(Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah)”, sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota.

Sementara untuk menarik wisatawan baik dalam dan luar negeri Kota Solo Menggunakan Slogan pariwisata “SOLO, *The Spirit of Java*”, yang artinya Solo, Jiwanya Jawa. Sesuai dengan Slogannya “Solo Jiwanya Jawa”, Kota Solo memiliki Beberapa Julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya, dan Kota Seni Pertunjukan.

Potensi industri kreatif masih begitu besar untuk dapat digarap oleh pelaku bisnis di Indonesia khususnya yang ada di kota Solo. Keinginan Pemerintah Kota Solo yang ingin mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagai daya saing bangsa. Tren global pun mengarah ke sana. Tak berlebihan jika Solo punya keinginan demikian. Kontribusi Ekonomi Kreatif yang cukup tinggi pada perekonomian nasional maka

dari itu Ekonomi Kreatif perlu dikembangkan dan di dukung untuk lebih berkembang dan lebih maju.

Industri kreatif menjadi pokok bahasan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Surakarta. Industri kreatif merupakan sektor penggerak yang dapat menciptakan daya saing bagi sektor lainnya maupun daya saing daerah. Industri kreatif di Kota Surakarta diyakini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Industri kreatif didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sumber daya utamanya adalah kreativitas (*creativity*) yang didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari pakem (*thinking outside the box*).

Kreativitas merupakan faktor yang menggerakkan lahirnya inovasi (*innovation*) dengan memanfaatkan penemuan (*invention*) yang sudah ada. Kota Surakarta sebagai daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam memadai, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengoptimalkan industri kreatif sebagai sektor yang dapat meningkatkan perekonomiannya.

Kota Surakarta sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif mewakili Propinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan budaya dan insan kreatif yang sangat besar. Setiap kecamatan memiliki sumberdaya kreatif dan produk kreatif yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Potensi tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif yang berdampak pada tingginya sumbangan sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan 15 jenis usaha kreatif. Dari 15 jenis usaha kreatif tersebut, Kota Surakarta telah menetapkan 5 jenis industri yang menjadi unggulan kota Surakarta, yaitu seni pertunjukan, desain, kerajinan, kuliner dan fesyen. Penetapan 5 jenis unggulan ini tidak terlepas dari Kota Surakarta sebagai kota yang memiliki banyak warisan budaya.

1.2. Rumusan Masalah

MEA merupakan sebuah peluang bagi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN baik dalam hal ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk untuk

menguasai pasar ASEAN dengan berbagai produk buatan dalam negeri yang menonjolkan seni dan kreatifitas khas Indonesia.

Namun, tentunya negara ASEAN lainnya juga memiliki mimpi yang sama untuk menguasai pasar serumpun di kawasan regional tersebut. Thailand sendiri bisa dibilang negara yang sangat siap dalam menyambut MEA, selain dikabarkan bahwa banyak penduduknya yang sudah meningkatkan kemampuan bahasa asingnya, produk-produk kerajinan industri kreatif asal Thailand pun tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk sejenis buatan Solo.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan industri kreatif di Kota Solo ?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan industri kreatif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Menganalisis perkembangan industri kreatif di Kota Solo .
2. Menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan industri kreatif .

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memiliki dua manfaat yaitu sebagai kontribusi praktis dan kontribusi teoritis.

1.4.1. Manfaat Praktis

Kontribusi praktis yaitu hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Solo dalam menentukan sikap dan kebijakan serta mempersiapkan industri kreatif di wilayahnya untuk menghadapi MEA

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan keilmuan terkait dengan bagaimana manfaat dan signifikansi penggunaan teori *competitive advantage* dalam menghadapi persaingan bebas

regional yaitu MEA dan mengkaji seberapa besar kekuatan Industri Kreatif untuk dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki Indonesia khususnya di Kota Solo.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari a. Latar Belakang berisikan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, Industri Kreatif di Indonesia dan Industri Kreatif di Kota Solo, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Studi Pustaka dan Kerangka Pemikiran, terdiri dari a. Definisi Konseptual, b. Teori Kebijakan c. Pergeseran Pola Kegiatan Ekonomi,

Bab 3 Metode penelitian, terdiri dari a. Pendekatan Penelitian, b. Jenis Penelitian, c. Teknik Pengumpulan Data Sumber dan Jenis Data, d. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi Konseptual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan sepanjang sejarah manusia itu sendiri, paling tidak sejak manusia mampu melahirkan, memelihara serta memanfaatkan pengetahuan dalam kaitannya dengan sebuah tindakan. Istilah analisis kebijakan kemudian diartikan sebagai cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia untuk memecahkan masalah kebijakan. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dibutuhkan suatu penelitian kebijakan.

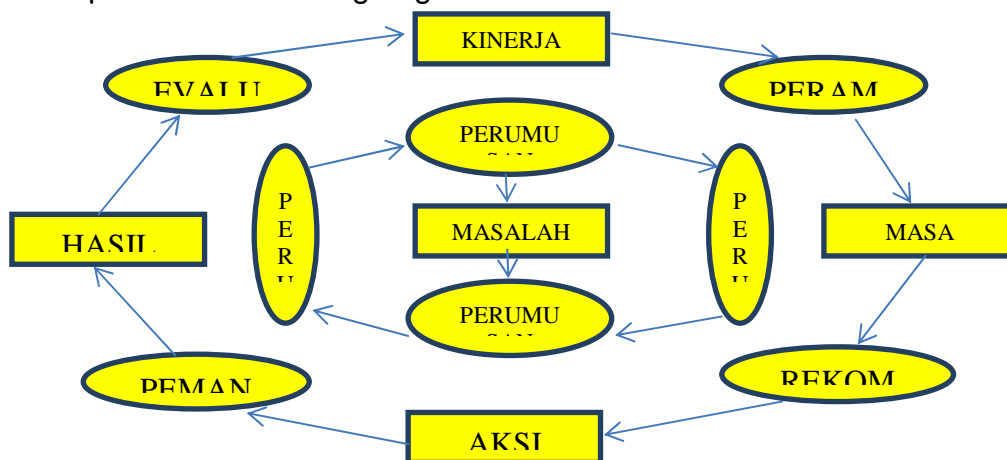
Sudarwan Danim (2005) menyatakan bahwa penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah social. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan. Baginya, hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah – masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk

dukungan kepada kebijakan itu sendiri. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak diterapkan.

2.2. Teori Kebijakan

Analisis kebijakan sebagai suatu penelitian social terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah – masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah – masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ada tiga hal yang secara umum harus dijawab dalam analisa kebijakan yaitu : 1) nilai, yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, 2) fakta, yang keberadaannya dapat membaasi atau meningkatkan pencapaian nilai – nilai, 3) tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai – nilai (Dunn, 2003).

Untuk menjawabnya makan dibutuhkan suatu prosedur yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Bagi Dunn ada prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yakni dengan menggabungkan 5 prosedur penting yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi (Dunn, 2003). Masing – masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan. Secara lebih jelas digambarkan hubungan antara lima informasi kebijakn dan lima prosedur kebijakn yang ia formulasikan sebagai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah dengan gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

Sumber : William Dunn, 2003

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara satu prosedur dengan prosedur lainnya. Hubungan tersebut dapat tergambar pada perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi – kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Melalui prosedur ini dapat diketahui masalah – masalah yang akan menjadi fokus kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu di diterapkannya alternative kebijakan. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengetasan masalah.

Pada umumnya, analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan dasar dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut (Nawawi, 2009), yaitu :

1. Definisi Masalah
2. Implementasi Kebijakan
3. Akibat – akibat kebijakan

Ketiga hal di atas dalam proses analisis kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, maka analisis kebijakan bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal – hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan penjelasan mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Sedangkan, Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno: 2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga

membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :

1. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
 - b. Melembagakan srategi.
 - c. Mengoperasionalkan strategi.
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi.
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
 - c. Integrasi dan koordinasi.
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
 - e. Hak, wewenang dan kewajiban.
 - f. Pendelegasian.
 - g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
 - h. Budaya organisasi.

3. Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman

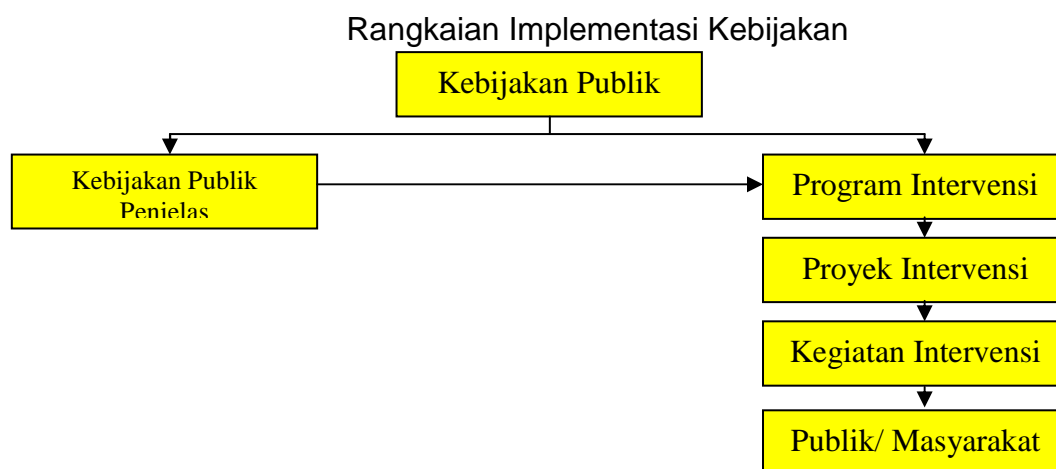
diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dengan konsep-konsepnya:

- a. Efektivitas kepemimpinan.
- b. Motivasi.
- c. Etika.
- d. Mutu.
- e. Kerja sama tim.
- f. Komunikasi organisasi.
- g. Negoisasi

4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:

- a. Desain pengendalian.
- b. Sistem informasi manajemen.
- c. Monitoring.
- d. Pengendalian anggaran atau keuangan.
- e. Audit.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Riant Nugroho (2004:159)

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3. Pergeseran Pola Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi saat ini telah mengalami perubahan mulai dari ekonomi tradisional yang menekankan pada kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi sampai pada kegiatan ekonomi yang menekankan pada spesialisasi. Liberalisme merupakan salah satu pendekatan tradisional dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Liberalisme ekonomi berakar dari tradisi Adam Smith dan David Ricardo. Asumsi kunci dari liberalisme ekonomi adalah dalam jangka panjang ekonomi akan membawa manfaat bagi semua orang jika pasar dibiarkan beroperasi secara bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Hal ini mempertimbangkan pasar sebagai sebuah alat yang paling efisien untuk mengorganisir produksi dan pertukaran manusia serta dalam hal ini negara mampu untuk melakukan perdagangan secara terbuka dan bebas satu sama lainnya.

Menurut Adam Smith pasar tidak perlu memproduksi barang-barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan bahwa pemerintah-lah yang perlu menyediakan barang-barang tersebut. Sedangkan dalam perekonomian negara menyediakan sebuah sistem yang legal untuk menjalankan kontrak dan menghindarkan terjadinya korupsi serta kompetisi yang tidak adil. Sehingga dapat dipahami bahwa tradisi liberal menekankan pada perdagangan internasional dan pasar bebas.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa banyak sekali kegiatan ekonomi yang telah dijalankan menurut beberapa ahli ekonomi dunia, saat ini mulai bergeser ke arah perbaikan pada sistem kerja atau yang disebut dengan ergonomis. Dimana untuk mendapatkan manfaat serta keuntungan dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi maka perlu adanya sistem kerja yang jelas. Menurut Sutalaksana, dkk (2006), ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu secara efektif, aman, dan nyaman. Ergonomi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ergonomi mikro dan ergonomi makro. Ergonomi mikro dapat dikatakan sebagai ergonomi dalam lingkup kecil atau ergonomi tradisional. Aktivitas menganalisis postur kerja pekerja, menaksir produktivitas, mendesain alat kerja, dan sebagainya dapat dikategorikan sebagai ergonomi mikro. Jadi, ergonomi mikro merupakan pendekatan ergonomi pada suatu proses yang ditujukan khusus pada proses spesifik. Perkembangan keilmuan saat ini melihat bahwa penilaian ergonomi tidak hanya perlu dilakukan dan dianalisis secara mikro saja, tetapi perlu untuk diimplementasikan melalui integrasi pada lingkungan yang lebih besar (organisasi perusahaan) yang dikenal dengan ergonomi makro. Ergonomi makro lebih kepada ergonomi secara luas yang menempatkan sistem produksi sebagai organisasi kerja.

2.4. Ergonomi Makro

Secara umum, ergonomi makro merupakan suatu pendekatan ergonomi yang berbasis pada perancangan organisasi dalam suatu sistem kerja. Ergonomi makro didefinisikan sebagai pendekatan *top-down* secara sosioteknikal yang diterapkan dalam perancangan sistem kerja secara keseluruhan pada interaksi *human-job*, *human-machine*, dan *human software interface* (Hendrick & Kleiner, 2001). Pendekatan ini memiliki tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis. Ergonomi makro berperan dalam mendesain beberapa sosioteknikal sistem dalam kaitannya dengan "manusia-organisasi" dan "teknologi".

Ergonomi makro sering disamakan dengan ergonomi organisasi. Secara kasar dapat dibenarkan karena ergonomi organisasi sering berbicara di lingkup sistem. Namun, untuk beberapa kasus mungkin kurang tepat karena ergonomi organisasi

juga sering dipakai di tingkat ergonomi mikro, misalnya saja dalam menaksir produktivitas individu atau kelompok kecil tanpa memperhatikan penyebabnya (hanya ingin tahu seberapa besar produktivitas) atau analisis fungsi kerja, dan sebagainya. Aktivitas ergonomi tersebut memang tergolong sosioteknik namun tidak menyeluruh sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ergonomi makro. Akan tetapi, perlu diakui bahwa ergonomi makro dan ergonomi organisasi itu hubungannya sangat dekat. Ergonomi makro memiliki beberapa kajian, diantaranya dimensi struktural sistem kerja dan sistem sosioteknik. Pembahasan untuk kedua kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Konsep dasar dimensi struktural sistem kerja yaitu organisasi serta desain organisasi. Organisasi merupakan koordinasi terencana dari dua orang atau lebih yang menjalankan fungsi pada suatu basis yang relatif kontinyu dan melalui pembagian kerja serta suatu hierarki untuk mencapai tujuan tertentu. Desain organisasi berhubungan dengan perancangan struktur dan proses-proses terkait dari sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara konseptual, dimensi struktural sistem kerja terdiri dari 3 dimensi, yaitu:

1) Kompleksitas

Kompleksitas merupakan derajat diferensiasi dan integrasi yang ada di dalam suatu sistem kerja. Diferensiasi merupakan tingkat segmentasi, yang terdiri dari 3 tipe:

a. Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada bentuk struktur organisasi. Semakin meningkatnya diferensiasi, maka demikian pula kompleksitasnya karena jumlah hierarki di dalam organisasi bertambah. Makin banyak tingkatan yang terdapat di antara *top management* dan tingkat hierarki yang paling rendah, makin besar pula distorsi dalam komunikasi, dan makin sulit pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta makin sukar bagi *top management* untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Organisasi dengan jumlah pegawai yang sama tidak perlu mempunyai tingkat diferensiasi vertikal yang sama. Organisasi dapat berbentuk tinggi, dengan banyak lapisan hierarki, atau

mendatar dengan sedikit tingkatan. Faktor yang menentukan diferensiasi vertikal adalah rentang kendali (*span of control*).

b. Diferensiasi horisontal

Diferensiasi horisontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi pada anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Orientasi yang berbeda akan lebih menyulitkan pada anggota organisasi untuk berkomunikasi dan menyulitkan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam organisasi.

Bukti paling nyata pada organisasi yang menekankan pada diferensiasi horisontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Spesialisasi merujuk pada pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan satu individu. Bentuk spesialisasi yang paling dikenal adalah spesialisasi fungsional dimana pekerjaan dipecah-pecah menjadi tugas yang sederhana dan berulang. Spesialisasi fungsional ini dikenal sebagai pembagian kerja (*division of labor*). Spesialisasi fungsional menciptakan kemampuan substitusi diantara para pegawai dan mempermudah penggantiannya oleh manajemen.

c. Dispersi spasial

Dispersi spasial merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. Organisasi yang tersebar secara geografis akan semakin tinggi kompleksitasnya. Elemen dispersi spasial memperhatikan dua hal yaitu jarak maupun jumlah. Robbins (1990) menyatakan bahwa dispersi spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari diferensiasi horisontal dan diferensiasi vertikal. Integrasi merupakan jumlah mekanisme yang dirancang untuk komunikasi, koordinasi, dan pengendalian.

Secara umum, jika diferensiasi sistem kerja meningkat, maka kebutuhan mekanisme integrasi juga meningkat. Hal ini terjadi karena diferensiasi yang lebih besar meningkatkan jumlah unit, tingkatan, dan departemen yang harus berkomunikasi satu sama lain, berkoordinasi dengan kegiatan masing-masing, serta pengendalian untuk operasi yang efisien.

2) Formalisasi

Formalisasi merupakan derajat standarisasi sistem kerja. Tingkat formalisasi suatu organisasi ditentukan oleh beberapa kriteria. Jika ada sebagian besar kriteria seperti uraian pekerjaan jelas, aturan jelas, serta prosedur operasi terdefinisi secara rinci, maka dapat dikatakan tingkat formalisasinya tinggi. Tetapi jika terdapat sebagian dari kriteria seperti aktivitas pekerja tidak terprogram, fleksibilitas kerja tinggi, serta pekerja leluasa dalam pengambilan keputusan, maka tingkat formalisasinya rendah.

3) Sentralisasi

Sentralisasi merupakan tingkat dimana pembuatan keputusan formal dikonsentrasikan dalam suatu kelompok individu yang biasanya merupakan level tinggi dalam organisasi. Karakteristik suatu organisasi yang sentralisasinya tinggi yaitu supervisor level rendah dan karyawan hanya memberikan input minimal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pekerjaannya dikarenakan tingkat profesionalitas pekerja rendah. Sebaliknya, organisasi yang sentralisasinya rendah (desentralisasi), keputusan didelegasikan ke bawah sampai level terendah yang memiliki keahlian penting. Adapun bentuk dasar pengambilan keputusan dalam organisasi yaitu *strategic (long-range planning)* yakni keputusan jangka panjang dan *tactical (day-to-day operation)* yang biasanya tak terduga.

2.5. Model Sistem Sosioteknik

Model sistem sosioteknik pertama kali dikembangkan oleh Trist & Bamforth (1951) dari Tavistock Institute of Human Relations, Inggris. Model ini memandang organisasi sebagai agen transformasi yang mentransformasikan input menjadi output. Elemen-elemen dalam sistem sosioteknik yaitu:

1) Subsistem Teknologi

Joan Woodward (1965) dalam Hendrick dan Kleiner (2001) menyatakan teknologi merupakan penentu struktur organisasi sistem kerja. Teknologi diklasifikasikan berdasarkan jenis produksi (*production technology*), tindakan individual (*knowledge-based technology*), serta tingkat otomasi, tingkat kesulitan aliran dan spesifikasi aktivitas (*work-flow integration*).

a. Jenis produksi (*production technology*)

(1) *Job Shop* (berdasarkan order)

Karakteristik jobshop yaitu biasanya memproduksi satu atau beberapa item saja (*custom-made product*). Contoh jenis produksi jobshop antara lain: industri kerajinan, industri furniture, dll. Jenis produksi ini memiliki tingkat kerumitan yang relatif rendah dengan sedikit tenaga pada lini produksi dan administrasi. Tingkat formalisasi dan sentralisasinya cenderung rendah. Supervisor memiliki jangkauan pengendalian yang terbatas serta pekerjaannya dideskripsikan secara luas. Dalam hal ini pekerja dapat bekerja secara fleksibel.

(2) *Mass Production* (produksi massal)

Lain halnya dengan jenis produksi jobshop, mass production memproduksi dalam jumlah batch yang besar. Contoh industrinya antara lain: industri mobil, industri motor, industri minuman. dll. Mass production memiliki kompleksitas yang tinggi dengan pembagian departemen yang jelas. Tingkat formalisasi dan sentralisasinya juga tinggi. Supervisor terendah mempunyai pengendalian cukup luas. Pekerjaan pada jenis produksi ini dideskripsikan secara sempit.

(3) *Process Production* (berdasarkan proses)

Jenis produksi process production memiliki kompleksitas yang paling tinggi karena tingkat otomasinya juga tinggi. Proses produksinya sangat tergantung pada mesin. Industri kimia merupakan salah satu contohnya. Hierarki organisasinya memiliki tingkat diferensiasi vertikal tinggi dengan sedikit diferensiasi horisontal. Tingkat formalisasi dan sentralisasinya cenderung rendah. Supervisornya memiliki jangkauan pengendalian yang luas.

b. Tindakan individual (*knowledge-based technology*)

Knowledge-based technology dikembangkan oleh Perrow (1967). Perrow dalam Hendrick dan Kleiner (2001) mendefinisikan teknologi sebagai tindakan yang dilakukan terhadap suatu objek untuk mengubahnya, dimana tindakan ini membutuhkan pengetahuan teknologikal. Dimensi dalam *knowledge-based technology* dibagi menjadi 2, yaitu: a) Task variability (varian permasalahan dalam menjalankan aktivitas industri) b) Task analyzability (definisi prosedur setiap kegiatan/tugas)

c. Tingkat otomasi,

Tingkat kesulitan aliran dan spesifikasi aktivitas (*work-flow integration*) *Work-flow integration* dikembangkan oleh University of Aston. Teknologi dibedakan menjadi 3 karakteristik dasar, yaitu:

- (1) Otomasi peralatan
- (2) *Work-flow rigidity* (urutan kerja yang kaku)
- (3) *Specificity of evaluation* (tingkat dimana aktivitas kerja dapat dinilai secara spesifik, biasanya dengan ukuran-ukuran kuantitatif).

Kombinasi dari ketiga karakteristik dasar di atas disebut *work-flow integration*. Peningkatan *workflow integration* akan meningkatkan spesialisasi, formalisasi, dan desentralisasi.

- d. Subsistem Personel Karakteristik subsistem personel dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Tingkat profesionalisme

Robbins (1983) menyatakan bahwa formalisasi bersifat eksternal dan internal. Eksternal yang dimaksud yaitu aturan, prosedur, dan interface human-system yang membatasi keleluasaan pekerja. Sedangkan internal merupakan formalisasi yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang merupakan bagian integral dari pendidikan dan pelatihan. Profesionalisme diartikan sebagai pemahaman, nilai, norma, perilaku, persepsi, dan cara orang melakukan suatu pekerjaan tertentu yang didapat melalui pendidikan atau pelatihan formal.

Dalam pandangan ergonomi makro, terdapat trade-off antara formalisasi dalam sistem kerja dengan tingkat profesionalisme. Jika sistem kerja dirancang dengan tingkat formalisasi tinggi, maka pekerja dengan tingkat profesionalisme tinggi akan kurang berkembang di dalamnya. Sebaliknya, jika tingkat formalisasi rendah, maka kebutuhan profesionalisme pekerja akan meningkat sehingga harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup agar pekerja menjadi lebih kreatif.

- (2) Faktor demografi

Faktor demografi merupakan kecenderungan sosial masyarakat dalam memandang suatu jenis pekerjaan dan bagaimana nilai-nilai yang terlibat di dalamnya. Beberapa faktornya antara lain: umur pekerja, asal daerah, jenis kelamin, suku, jumlah jam kerja, dan gaji.

(3) Faktor psikososial

Faktor psikososial berkaitan dengan cara interaksi individu dengan organisasi dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: perbedaan karakter manusia, bentuk organisasi, birokrasi, dan diferensiasi.

2) Subsistem Lingkungan

Berlangsungnya organisasi tergantung pada kemampuan adaptasi dengan lingkungan eksternal. Jenis-jenis lingkungan eksternal antara lain:

- (1) Sosioekonomi
- (2) Pendidikan
- (3) Politik
- (4) Budaya
- (5) Hukum

Burns dan Stalker dalam Hendrick dan Kleiner (2001) mengemukakan jenis struktur sistem kerja untuk lingkungan organisasi yang relatif stabil dan sederhana berbeda dengan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Untuk lingkungan yang stabil, struktur sistem kerja yang paling sesuai adalah struktur mekanistik. Karakteristik struktur mekanistik adalah diferensiasi vertikal dan horisontal tinggi demikian juga formalisasi dan sentralisasi. Pada umumnya sistem kerja terdiri dari tugas-tugas rutin dan terprogram serta tidak dapat merespon perubahan dengan segera. Untuk lingkungan yang dinamis dan kompleks, struktur sistem kerja yang sesuai adalah struktur organik. Karakteristik struktur organik adalah tingkat adaptasi yang fleksibel dan cepat; diferensiasi vertikal dan formalisasi rendah; adanya desentralisasi pengambilan keputusan tactical. Pada beberapa kasus dapat terjadi hasil analisis dari 3 subsistem menunjukkan konvergensi, tetapi mungkin juga hasil ketiganya berbeda satu dengan yang lain.

Jika terjadi perbedaan hasil, ahli ergonomi harus dapat menyatukan hasil-hasil yang berbeda tersebut. Caranya adalah dengan integrasi dengan pembobotan. Hackman dan Oldhan dalam Hendrick dan Kleiner (2001) mengidentifikasi secara empiris 5 karakteristik job yang mendukung motivasi, kepuasan kerja, pengembangan diri, dan mereduksi stress pekerja, yaitu: *Task variety*, *Identivy*, *Significance*, *Autonomy*, dan *Feedback*. Jika tidak mempertimbangkan 5 karakteristik tersebut, maka akan terjadi dehumanizing,

berkurangnya arti psikologis, berkurangnya rasa tanggung jawab pekerja, stres kerja, ketidakpuasan, mangkirnya pekerja, serta berkurangnya produktivitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosdy Ruslan,2003:24). Sedangkan pengertian penelitian, adalah: usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah

3.1. Pendekatan Analisis

Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah).

Secara umum, jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisisnya dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini lazim juga disebut sebagai pendekatan, ancangan, rencana atau desain.

Rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian Dan, dalam arti luas rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrument, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kualitatif. Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif (persepsi manusia) dengan bantuan kuesioner dan interview. Analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan, bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian, melalui penelaahan berbagai literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dokumen, perundang-undangan negara maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan industry kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal.
2. Observasi atau penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa variabel penelitian yang berkenaan dengan observasi ini, yakni berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota, potensi wilayah, aspek internal usaha, institusi pendukung dan keterkaitan jaringan (kerjasama atau kemitraan).
3. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pihak pemerintah kota, pembina pengembangan industri kreatif di Kota Solo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas UKM dan Koperasi Kota Solo, serta ketua paguyuban pengusaha UKM di Kota Solo.

4. Kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab oleh narasumber yang terpilih yaitu Pemerintah Kota Solo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Solo, Pusat kerajinan dan Batik Kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo.

3.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

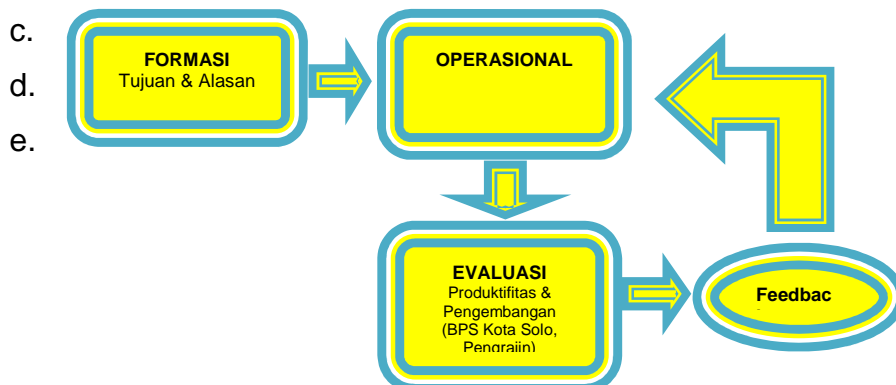
Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kusioner kepada semua responden diolah berdasarkan ketentuan teknik analisis yang digunakan. Hal yang terpenting dalam pengolahan data ini adalah pemahaman tentang karakteristik data yang digunakan, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki unsur nominal. Irawan (1999:86). Dengan diperolehnya skala dari kualitas pendapat yang diberikan responden, maka dapat diperoleh informasi dari masing – masing responden dalam menanggapi suatu kondisi atau suatu kategori tertentu.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan Analisis Kualitatif. Analisis ini digunakan untuk melihat kondisi dari indikator – indikator sehingga bisa menjawab pertanyaan permasalahan.

- a. Bagaimana perkembangan industri kreatif di Kota Solo?
- b. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan industri kreatif?

Model penelitian mengacu pada tahap-tahap penelitian yaitu tahap formasi, operasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting satu sama lainnya karena tahap operasi dipengaruhi oleh tahap formasi. Demikian pula tahap operasi mempengaruhi tahap evaluasi.



Gambar . Theoretical Framework. Sumber : Diolah oleh tim peneliti

Seperti yang terlihat dalam Gambar di atas, jika (Formasi) tujuan dan alasan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada 31 Desember 2015 akankah menjadi sebuah ancaman atau peluang bagi industri kreatif di Kota Solo, sehingga pada tahap (Operasional) apakah pihak-pihak yang terkait yaitu Pemerintah Kota Solo, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Solo, dan Pusat Kerajinan dan Batik Solo memiliki langkah-langkah kebijakan yang mampu memperkuat dan mengembangkan sektor industri kreatif di Kota Solo. Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya dapat di Evaluasi oleh para pengrajin maupun Badan Pusat Statistik (BPS) kota Solo apakah berdampak positif atau negatif bagi perkembangan industri kreatif di Kota Solo. Selain itu juga akan ada *feedback* untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut sudah sesuai dan cukup untuk mengembangkan industri kreatif Kota Solo di tengah persaingan MEA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Surakarta/Solo

Kota Surakarta biasa disebut juga *nagari* oleh penduduk kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota Sala menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat Kota Sala dan Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. undang undang Nomor: 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter, baik sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan

ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Sama seperti karakteristik perkotaan lainnya, dimana kontribusi sector tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan sektor primer, struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan, jasa wisata (hotel, restoran, budaya dan hiburan) serta jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari PDRB Kota Surakarta.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontibutor sektor terbesar dalam struktur PDRB Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,35% terhadap PDB Kota Surakarta. Sub sektor perdagangan, termasuk dalam kategori ini adalah perdagangan besar (grosir) dan eceran (retail), baik di bidang tekstil dan turunannya, termasuk di bidang *food and beverage*. Pertumbuhan dari sektor ini termasuk tinggi disamping dari sektor jasa keuangan, sehingga dengan adanya bencana kebakaran Pasar Klewer pada akhir tahun 2014, dampak kontribusi dan pertumbuhan sektor ini dan sektor keuangan, diperkirakan akan mengalami penurunan terhadap PDRB pada tahun 2015.

Sektor unggulan di kota Surakarta secara umum dapat dilihat pada masing-masing cluster di setiap Kecamatan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kecamatan Laweyan, berupa kampung batik Laweyan, mencakup batik, garmen maupun olah tekstil, mebel, dengan kegiatan pendukungnya adalah pendidikan, biro travel, perhotelan, maupun tempat wisata. 2. Kecamatan Serengan, berupa industri pengolahan makanan dan minuman, pakaian tradisional, industri kreatif, baik kerajinan batik, maupun pembuatan *letter*. 3. Kecamatan Pasar Kliwon, berupa

kerajinan dan batik kayu, biro perjalanan, kesenian tradisional, tempat wisata, maupun jasa sablon. 4. Kecamatan Jebres, berupa *meubel*, batik tekstil dan garmen, serta jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, jasa pendidikan maupun pelatihan, dan gedung olah raga. Kecamatan Banjarsari berupa minuman tradisional (jamu), krupuk, sangkar burung, *meubel*, dan jasa pendukungnya berupa pendidikan, biro perjalanan dan penginapan/hotel. (Bappeda Kota Sura Karta, Analisa ekonomi kota Surakarta tahun 2014)

Visi dan Misi Kota Surakarta Tahun 2010-2016

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021, Visi Walikota-Wakil Walikota Surakarta terpilih Tahun 2016-2021, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah :

Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.”** Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.

Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan,

Batas-batas wilayah kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sukoharjo

Dari kelima kecamatan di kota Surakarta, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km². atau sebesar 33,63% dari luas wilayah Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km². atau sebesar 7,04% dari luas wilayah Kota Surakarta. Data Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta sebagaimana pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | RT | Luas Wilayah (Ha) |
|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1 | Laweyan | 11 | 105 | 458 | 863,83 (19,61%) |
| 2 | Serengan | 7 | 72 | 312 | 319,4 (7,25%) |
| 3 | Pasar Kliwon | 9 | 100 | 424 | 481,52 (10,93%) |
| 4 | Jebres | 11 | 149 | 637 | 1258,18 (28,57%) |
| 5 | Banjarsari | 13 | 175 | 874 | 1481,1 (33,63%) |
| | Jumlah | 51 | 604 | 2.714 | 100% |

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2015

Dari Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,06 Km² digunakan untuk tempat pemukiman sebesar 65%, kegiatan ekonomi berkisar antara 16,5% dari luas lahan yang ada. Suhu udara rata-rata di Kota Surakarta pada tahun 2014 berkisar antara 25,8°C sampai dengan 28,9°C. Kelembaban udara berkisar antara 65 persen sampai dengan 88 persen. Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 27 hari. Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar

306,00 mm jatuh pada bulan Januari. Sementara itu rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar jatuh pada bulan Januari sebesar 14 mm per hari hujan.

Ketinggian wilayah, Kota Surakarta termasuk kawasan dataran rendah. Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter dari permukaan laut, sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta rata-rata memiliki suhu udara antara 25,8°C sampai dengan 28,3°C. Kelembaban udaranya antara 66% sampai dengan 88%. Jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Januari yaitu 25 hari dengan curah hujan sebesar 783 mm. Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, luasnya mencapai kurang lebih 65% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kota Surakarta sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terbagi atas pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat; ruang terbuka hijau (RTH); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang termasuk dalam kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan RTNH; kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lain (pertanian; perikanan; pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan pertahanan dan keamanan).

Kawasan perlindungan di Kota Surakarta meliputi kawasan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajah putih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung. Luas kawasan perlindungan mencapai 401 Ha yang tersebar di 5 wilayah kawasan.

4.1.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Surakarta tersebar di 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sejumlah 181.006 jiwa yang terdiri dari 89.323 laki-laki dan 91.683 perempuan atau

31,71% dari total penduduk, disusul Kecamatan Jebres dengan 25,61%. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Serengan yaitu sejumlah 54.649 Jiwa dimana 26.827 laki-laki dan 27.822 perempuan atau 9,57% dari total penduduk.

Proporsi penduduk perempuan disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki. Rincian Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di jelaskan pada gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis **Kelamin**



ñffer_9i_g&m1EqM6žzm±f0e3v`e;_5%lf!ÓeqX0d_eñlðe_gfh_ape±gb,,ð%±,-a!æô!E1qà

D:l_a%L±\$gå0í3m_6fÅ0â_m3roe_